

## BAB II

### Masyarakat Ekonomi ASEAN

#### A. Sejarah Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti *ASEAN Industrial Projects Plan* (1976), *Preferential Trading Arrangement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation scheme* (1981), *ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading arrangement* (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.<sup>69</sup>

Dari perspektif sejarah, artikulasi pertama dari konsep integrasi ekonomi ASEAN terungkap dalam Perjanjian Peningkatan Kerjasama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani di Singapura pada tahun 1992. Perjanjian tersebut menyoroti

---

<sup>69</sup> Donald E. Weatherbee, *International relations in Southeast Asia : the struggle for autonomy* (United States of America by Rowman & Littlefield Publishers, 2009) 99-106.

pentingnya kerjasama di bidang perdagangan; industri, energi dan mineral, keuangan dan perbankan, pangan, pertanian, dan kehutanan, serta transportasi dan komunikasi.

Persetujuan ini akhirnya mengarah pada pembentukan perjanjian kunci awal ASEAN. Perjanjian tentang Efektif Tariff Scheme Preferential umum untuk ASEAN Free Trade Area ditandatangani pada tahun 1992, yang digantikan oleh ASEAN Trade in Goods Agreement pada tahun 2010, sedangkan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa ditandatangani pada tahun 1995. ASEAN juga telah dimasukkan ke dalam menempatkan sejumlah perjanjian investasi yang berfokus: Perjanjian ASEAN Investment Guarantee (ASEAN IGA) dan Perjanjian Kerangka Kerja Lokasi ASEAN Investment (Persetujuan Kerangka Kerja AIA), kemudian, digantikan oleh ASEAN Comprehensive Investment Agreement, yang mulai berlaku pada tahun 2012.<sup>70</sup>

Diawali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 pada tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan disepakatinya sebuah visi ASEAN 2020 yang akan menciptakan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing yang tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang

---

<sup>70</sup> *A Blueprint for Growth ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015), 3-4

jasa, dan meningkatkan pergerakan tenaga profesional dan jasa lainnya secara bebas dikawasan.<sup>71</sup>

Pada KTT ke-5 ASEAN di Singapura tahun 1992 telah ditandatangani *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation* sekaligus menandai dicanangkannya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) sebagai mekanisme utama. Pendirian AFTA memberikan implikasi dalam bentuk pengurangan dan eliminasi tarif, penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan fasilitasi perdagangan. Dalam perkembangannya, AFTA tidak hanya difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa dan investasi.<sup>72</sup>

Kemudian pada KTT yang ke-6 ASEAN pada tanggal 6 Desember 1998 di Ha Noi, Vietnam pemimpin-pemimpin ASEAN mengesahkan Rencana Aksi Hanoi (*Hanoi Plan of Action /HPA*) yang juga merupakan sebuah langkah awal untuk merealisasikan tujuan visi 2020 ASEAN. Rencana ini mempunyai pembatasan waktu yaitu 6 tahun dari tahun 1999-2004.

Selanjutnya pada KTT ke-7 ASEAN tanggal 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam menyepakati dibentuknya *Roadmap for Integration of ASEAN* (RIA). Sedangkan pada pertemuan yang ke-34 tanggal 12 September 2002 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam para Menteri

---

<sup>71</sup> Mutiara Pratiwi. *Pengaruh Mea 2015 Terhadap Integrasi Pada Sistem Perdagangan Di Indonesia* *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, vol 3 No.4 297-299

<sup>72</sup> Ibid., weatherbee

Ekonomi ASEAN mengesahkan RIA tersebut. Dimana rencana aksi tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Mengembangkan dan menggunakan pendekatan alternatif untuk liberalisasi.
2. Mengupayakan penerapan kerangka regulasi yang sesuai.
3. Menghapuskan semua halangan yang menghambat pergerakan bebas perdagangan jasa di kawasan ASEAN.
4. Menyelesaikan Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik untuk bidang jasa profesional.

Pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 ASEAN menyetujui *Deklarasi Bali Concord II* yang menyepakati pembentukan *ASEAN Economic Community* sebagai upaya untuk mewujudkan integrasi ekonomi kawasan. KTT tersebut menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah *ASEAN Economic Community (AEC)*. AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan, yaitu: produk-produk pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk-produk turunan dari karet, tekstil dan pakaian, produk-produk turunan dari kayu, transportasi

---

<sup>73</sup> Ibid., Mutiara Pratiwi.

udara, e-ASEAN (ITC), kesehatan, dan pariwisata. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 jasa logistik dijadikan sektor prioritas yang ke-12.<sup>74</sup>

Setelah krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara, pada KTT ASEAN ke-9 di Bali, Oktober 2003 para kepala Negara ASEAN menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan Ekonomi yang bernama *Declaration of ASEAN Concord II* atau dikenal sebagai *Bali Concord II*, kemudian lebih diarahkan kepada integrasi ekonomi kawasan yang implementasinya mengacu pada *ASEAN Economic Community* yang merupakan salah satu pilar perwujudan ASEAN 2020.<sup>75</sup>

KTT ke-10 ASEAN di Vientiane tahun 2004 antara lain menyepakati *Vientiane Action Program (VAP)* yang merupakan panduan untuk mendukung implementasi pencapaian AEC di tahun 2020.

ASEAN *Economic Ministers Meeting (AEM)* di Kuala Lumpur bulan Agustus 2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru (*blueprint*) untuk menindaklanjuti pembentukan AEC dengan mengidentifikasi sifat-sifat dan elemen-elemen AEC pada tahun 2015 yang konsisten dengan *Bali Concord II* dan dengan target-target dan *timelines* yang jelas serta *pre-agreed flexibility* untuk mengakomodir kepentingan negara-negara anggota ASEAN.<sup>76</sup>

Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007 para Pemimpin ASEAN juga menyepakati percepatan pengintegrasian ekonomi kawasan dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Pencapaian ASEAN Economic

<sup>74</sup> Ibid, Weatherbee, Donald E. *International Relations*

<sup>75</sup> Yulianre darwis, *Masyarakat Ekonomi ASEAN : Prospek Pengusaha Muda Indonesia Berjaya di Pasar ASEAN* (Jakarta: Prenadamedia, 2014) 9-10.

<sup>76</sup> Ibid, Weatherbee, Donald E. *International Relations*

Community (AEC) semakin kuat dengan ditandatanganinya “*Cebu declaration on the acceleration of the establishment of an ASEAN community by 2015*” yang dilakukan oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke 12 ASEAN di Cebu Filipina, pada tanggal 13 Januari 2007 lalu. *ASEAN Economic Community (AEC)* pada dasarnya mengacu pada kebijakan yang disusun pada AEC Blueprint.<sup>77</sup>

Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun “Cetak Biru ASEAN *Economic Community (AEC)*”. Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu :

1. Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal);
2. Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM);
3. Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*; dan

---

<sup>77</sup> Mutiara Pratiwi, “Pengaruh Mea 2015 Terhadap Integrasi Pada Sistem Perdagangan Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.3 No.4*. 297-299

4. Menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*).<sup>78</sup>

Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui *priority actions* yang pencapaiannya dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakan *score card*. Disamping itu, diperlukan dukungan berupa kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan (*capacity building*) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta. Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga akan didukung dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian serta pengembangan di masing-masing negara.

Pada KTT ke 13 para pemimpin negara anggota ASEAN menandatangani “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*” di Singapura tanggal 20 November 2007. Piagam ini mulai berlaku secara efektif bagi semua negara anggota ASEAN yaitu pada tanggal 15 Desember 2008. Indonesia juga sudah melakukan ratifikasi Piagam ASEAN pada tanggal 6 November 2008 dalam bentuk Undang-undang No. 38 tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter Of Ther Association Of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid, Weatherbee, Donald E. *International Relations*

<sup>79</sup> Ibid, Mutiara Pratiwi, “Pengaruh Mea 297-299

Pada KTT ke-14 ASEAN tanggal 1 Maret 2009 di Hua Hin, Thailand, para Pemimpin ASEAN menandatangani *Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)* atau Peta-jalan menuju *ASEAN Community (2009-2015)*, sebuah gagasan baru untuk mengimplementasikan secara tepat waktu *ASEAN Economic Community Blueprint* (Cetak-Biru Komunitas Ekonomi ASEAN).<sup>80</sup>

Guna lebih mempertajam penetrasi pasar ke ASEAN, perdagangan bebas ASEAN diberlakukan yang diawali dengan disepakatinya ASEAN Free Trade Area (AFTA) tahun 1992 di Singapura. AFTA bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di ASEAN melalui perdagangan bebas, instrumennya adalah penghapusan tarif dagang dan hambatan perdagangan terhadap produk-produk tertentu secara bertahap.<sup>81</sup>

## **B. Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN**

MEA adalah realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi sebagai diadukan dalam Visi 2020, yang didasarkan pada konvergensi kepentingan negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas ekonomi integrasi melalui inisiatif yang ada dan baru dengan jadwal yang jelas. Dalam menetapkan MEA, ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi terbuka, berwawasan ke luar, inklusif, dan pasar yang didorong untuk selalu konsisten dengan aturan multilateral serta kepatuhan terhadap aturan berbasis sistem untuk kepatuhan yang efektif dan pelaksanaan komitmen ekonomi.

---

<sup>80</sup> Ibid.,

<sup>81</sup> Ibid, Yuliandre darwis, *Masyarakat Ekonomi ASEAN* 9-10.



MEA akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme baru dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan orang bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN. Sebagai langkah pertama untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN telah menerapkan rekomendasi dari Satuan Tugas Tingkat Tinggi (HLTF) Integrasi Ekonomi ASEAN yang terkandung dalam Bali Concord II

Pada saat yang sama, MEA akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi Kamboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam (CLMV) melalui Inisiatif Integrasi ASEAN dan regional inisiatif lainnya. bidang kerjasama lainnya juga akan dimasukkan seperti pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas; pengakuan kualifikasi profesional, konsultasi lebih dekat pada ekonomi makro dan kebijakan keuangan, langkah-langkah pembiayaan perdagangan, infrastruktur ditingkatkan dan komunikasi konektivitas, pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN, mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah, dan meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk pembangunan MEA.

Dengan mempertimbangkan pentingnya perdagangan eksternal untuk ASEAN dan perlu untuk Komunitas ASEAN secara keseluruhan tetap outward looking, AEC membayangkan berikut karakteristik kunci: (a) pasar tunggal dan basis produksi, (b) wilayah ekonomi yang sangat kompetitif, (c) wilayah

pembangunan ekonomi yang adil, dan (d) kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Karakteristik ini saling terkait dan saling menguatkan. Memasukkan unsur yang dibutuhkan setiap karakteristik dalam satu Blueprint harus memastikan konsistensi dan koherensi dari unsur-unsur sebagai serta pelaksanaannya dan koordinasi yang tepat antara pemangku kepentingan terkait.<sup>82</sup>

Sektor Prioritas Integrasi (Priority Integration Sectors/PIS) adalah sektor-sektor yang dianggap strategis untuk diliberalisasikan menuju pasar tunggal dan berbasis produksi. Para Menteri Ekonomi ASEAN dalam Special Informal AEM Meeting, tanggal 12-13 Juli 2003 di Jakarta menyepakati sebanyak 11 Sektor yang masuk kategori PIS. Selanjutnya, pada tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina, para Menteri Ekonomi ASEAN menyetujui penambahan sektor Logistik sehingga jumlah PIS menjadi 12 (dua belas) sektor. Dalam proses meliberalisasikan seluruh sector PIS tersebut, disepakati agar setiap Negara Anggota ASEAN bertindak sebagai Koordinator untuk 12 sektor PIS berikut pariwisata, kesehatan, logistik, penerbangan, komunikasi, dan informatika, pertanian, kayu, karet, otomotif, tekstil atau garmen, elektronik dan perikanan.

### **C. Tujuan Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Dengan adanya MEA 2015 akan dapat mendorong terciptanya pembangunan jaringan-jaringan kerja produksi dan juga akan memperkuat integrasi regional pada sektor-sektor ekonomi dan dapat juga terciptanya pergerakan bebas pelaku-pelaku usaha dan tenaga kerja yang terdidik dan

---

<sup>82</sup> *The ASEAN Economic Community 2015 On the road to real business impact* (KPMG Asia Pacific Tax Centre, 2014), 4.

berwawasan. Selain itu sistem perdagangan dan syarat-syarat pabean dapat terstandardisasi dan sederhana diharapkan dapat mengurangi biaya-biaya transaksi antara sesama negara anggota ASEAN.

Penerapan MEA 2015 ini juga akan mentransformasikan ASEAN ke sebuah pasar tunggal yang berbentuk basis produksi, seperti Masyarakat Eropa (ME). Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN tersebut memiliki lima pilar liberalisasi sebagai kerangka kerja MEA 2015 yang meliputi: liberalisasi arus barang, arus jasa, arus investasi, arus modal, dan pasar tenaga kerja. Dalam arus barang ini sudah jelas akan dapat mempengaruhi arus ekspor dan impor barang dari masing-masing negara anggota ASEAN.

MEA sebenarnya telah menjadi kesepakatan antar para pemimpin negara-negara ASEAN semenjak lebih dari 10 tahun lalu. Pasar bebas yang diberlakukan di akhir tahun 2015 ini memungkinkan masing-masing negara untuk menjual produk secara lebih mudah ke negara lainnya. Hal ini dimaksudkan agar negara-negara ASEAN lebih unggul saat bersaing dengan negara India dan Cina dalam menarik investor asing.<sup>83</sup>

Jika dilihat dari pilar-pilar yang menyokong Masyarakat Ekonomi ASEAN Pilar pertama membayangkan ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal, dimana barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil yang mampu mengalir bebas, dan modal lebih bebas di kawasan ini. Hal ini juga ditingkatkan dengan kerjasama di bidang kepabeanan, standar dan penilaian kesesuaian, sektor integrasi prioritas dan dalam makanan, pertanian dan kehutanan. Secara

---

<sup>83</sup> Afin Murtie, *Bisnis Tahan Banting Sambut MEA* (Klaten: Cable Book, 2015), 8

kumulatif, ini bertujuan untuk pasar yang lebih liberal yang menyediakan populasi dengan peluang yang lebih besar untuk perdagangan dan melakukan bisnis di kawasan ini, dengan biaya perdagangan berkurang dan ditingkatkan rezim investasi yang membuat ASEAN menjadi tujuan investasi yang lebih menarik bagi investor internasional dan domestik.<sup>84</sup>

AEC melalui pilar kedua bertujuan untuk membentuk kawasan ekonomi yang sangat kompetitif. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan budaya persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, merangsang dan mempromosikan inovasi, dan menyediakan infrastruktur publik regional melalui hubungan infrastruktur transportasi multimodal, konektivitas dan kerjasama energi.

Pilar ketiga dibangun di atas aspirasi daerah untuk AEC yang inklusif dan berkeadilan. Ini berfokus pada upaya untuk mendukung usaha kecil dan menengah, serta yang lebih baru negara anggota ASEAN, untuk berpartisipasi secara efektif dan *gainfully* dalam proses integrasi. ASEAN beroperasi dalam lingkungan yang semakin global, pilar keempat berfokus pada pengembangan dan mengadopsi pendekatan yang koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, dan meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan global.<sup>85</sup>

Di bawah Blueprint MEA, pada 2015 negara-negara ASEAN yang mengintegrasikan perekonomian mereka sebagai pasar tunggal dengan gerakan bebas dari faktor produksi termasuk barang, investasi, jasa, modal, dan tenaga kerja terampil. Tujuannya adalah untuk membangun daerah yang kompetitif

---

<sup>84</sup> *A Blueprint for Growth ASEAN Economic Community 2015: Progress and Key Achievements* (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2015), 5-6.

<sup>85</sup> *Building the ASEAN Community: An Introduction to the ASEAN Economic Community (AEC) 2015*

melalui penciptaan pasar tunggal dan basis produksi. rekening negara-negara ASEAN untuk 9,8 % PDB Asia pada harga nilai tukar saat ini dan 15,4 % dari total penduduk Asia . Angka-angka tersebut meningkat menjadi 80 % dan 54,9 % masing-masing untuk ASEAN + 3 negara<sup>86</sup>

Namun adapun tujuan utama MEA 2015 adalah untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang setara dengan negara anggota-anggota ASEAN dan untuk membuat ASEAN menjadi sebuah kawasan ekonomi yang sangat kompetitif yang akan sepenuhnya dapat terintegrasi dalam ekonomi global.<sup>87</sup>

MEA berinisiatif agar negara-negara anggota ASEAN dapat mempromosikan pergerakan bebas barang, jasa-jasa, investasi, dan pekerja-pekerja terdidik lintas kawasan ASEAN. Upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan ASEAN sebagai kawasan dengan aliran bebas barang dalam MEA merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari agenda yang sebelumnya pernah dilaksanakan yaitu *Preferential Trading Arrangement (PTA)* pada tahun 1977 dan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* pada tahun 1992. Adapun perbandingan yang dapat kita lihat dari ketiga agenda tersebut adalah bahwa PTA dan AFTA lebih menekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan tarif, sedangkan untuk MEA lebih menekankan pada pengurangan dan penghapusan hambatan non-tarif.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Sjamsul Arifin, *Global Governance: Opportunities And Challenges For Asean Economic Community Paper Presented At The Workshop On "Managing Regional And Global Governance In Asia"* (Yogyakarta: Bank Indonesia, 2011), 13.

<sup>87</sup> Tulus Tambunan, *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 Apa Artinya Bagi UMKM Indonesia?*. (Center For Industry, SME and Business Competition Studies (USAkti) dan Kadin Indonesia, 2013).

<sup>88</sup> Sjamsul Arifin, Rizal A. Djafaara, dan Aida S. Budiman. *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*. (Jakarta: Gramedia, 2008)

#### **D. Manfaat Masyarakat Ekonomi ASEAN**

Menurut Bank Indonesia, secara teoritis, integrasi ekonomi menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi semua negara yang ada di dalamnya. Potensi meningkatnya kesejahteraan ini, antara lain terjadi melalui akses pasar yang terbuka, dorongan mencapai efisiensi dan daya saing ekonomi tinggi, serta terbukanya peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Sebagai satu kesatuan wilayah, ASEAN menjanjikan besarnya potensi ekonomi, pangsa total perdagangan GDP dari setiap negara, aliran modal internasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun juga melimpahnya jumlah tenaga kerja.<sup>89</sup>

Jika dilihat dari sisi perdagangan antarnegara ASEAN, prospek perdagangan dalam kawasan pun sangat menjanjikan. Dalam laporan outlook ekonomi Indonesia 2008-2012 yang dikeluarkan bank Indonesia (2008), pangsa pasar ekspor Indonesia dinilai cukup tinggi dan meningkat cukup pesat. Manfaat lain yang dapat dicapai dari pasar MEA 2015 tidak terbatas di sector perdagangan, tetapi membantu meningkatkan kinerja pertumbuhan negara-negara anggota dan menurunkan tingkat kemiskinan.<sup>90</sup>

#### **E. Berkiblat pada Customs Unions**

Area perdagangan bebas merupakan bentuk integrasi ekonomi dengan kondisi seluruh hambatan perdagangan dihapus bagi para anggotanya, tetapi tiap-tiap negara tetap memakai hambatan dagangnya dengan negara bukan anggota. Custom Union memperkenankan tidak adanya tarif atau hambatan perdagangan

---

<sup>89</sup> Ibid, Yuliandre darwis, *Masyarakat Ekonomi ASEAN*, 37-38

<sup>90</sup> Ibid.,

lain di antara anggotanya dan sebagai tambahan, custom unions menyelaraskan kebijakan perdagangan bagi seluruh dunia. Selain pengaruh kesejahteraan statis yang dibahas sebelumnya, negara yang membentuk customs unions cenderung menerima beberapa manfaat dinamis yang penting. Hal ini akibat naiknya persaingan, skala ekonomi, dorongan investasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang lebih baik.

Manfaat terbesar dari terbentuknya Customs Unions adalah kenaikan persaingan yang akan terjadi. Yakni, tanpa Customs Unions, produsen akan tumbuh dengan lamban dan hambatan perdagangan di antara negara anggotanya dihapuskan, produsen di setiap negara harus menjadi lebih efisien untuk mengikuti persaingan dengan produsen lainnya dengan berserikat, bergabung dan menutup usahanya. Kenaikan tingkat persaingan juga akan mendorong perkembangan dan penggunaan teknologi baru. Seluruh usaha tersebut akan mengurangi biaya produksi demi keuntungan konsumen. Manfaat kedua yaitu skala ekonomi cenderung berasal dari pasar yang membesar. Akan tetapi harus ditekankan bahwa bahkan sebuah negara kecil yang bukan anggota customs unions apa pun dapat mengatasi pasar domestiknya yang kecil dan meraih skala ekonomi produksi yang besar dengan mengekspor ke seluruh dunia. Manfaat lain yaitu dorongan investasi guna mengambil untung di pasar yang membesar dan guna mengikuti persaingan yang meningkat. Selanjutnya pembentukan customs unions cenderung memacu pihak luar untuk mendirikan fasilitas produksi di dalam customs unions guna menghindari hambatan perdagangan yang dibebankan pada produk tanpa serikat.

Terakhir di dalam Customs Unions yang juga merupakan pasar bersama, pergerakan bebas masyarakat luas akan tenaga kerja dan modal cenderung menghasilkan penggunaan sumber daya ekonomi yang lebih baik oleh seluruh masyarakat.<sup>91</sup> Berkaitan dengan konsep Customs Unions yang berkembang dinegara eropa, salah satu tokoh filosofi yang bernama John Naisbitt menanggapi isu tentang Eropa yang akan mengalami kemerosotan bersama. Memang Eropa telah tergabung dalam wadah Uni Eropa dan bercita-cita jadi pengendali ekonomi dunia liberal. Tapi, perubahan itu ternyata tidak dirintangi revolusi meninggalkan pola pikir memilih mengatasi masalah daripada mengeksploitasi peluang melainkan masih tetap mempertahankan negara kesejahteraan atau sosialis sehingga Uni Eropa akan mengalami kemerosotan bersama lantaran perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Dominick Salvatore. *Ekonomi Internasional* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 312-318

<sup>92</sup> Nur Mursidi, "Epistemologi Naisbitt Meraba Masa Depan", Etalasebuku, <http://etalasebuku.blogspot.co.id/2007/12/resensi-ini-dimuat-di-sinar-harapan.html>, 8 desember 2007, diakses pada tanggal 31 juli 2016